

ANALISIS ASPEK PENGELOLAAN KOLABORATIF DI TAMAN NASIONAL LAUT KEPULAUAN SERIBU (TNKpS)

(*Analysis of Collaborative Management aspects in Kepulauan Seribu Marine National Park (TNKpS)*)

EKA DANA PRABOWO¹⁾, HARNIOS ARIEF²⁾ DAN TUTUT SUNARMINTO³⁾

¹⁾Mahasiswa Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor

^{2,3)} Dosen Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB

Email: eka.prabowo10@apps.ipb.ac.id

Diterima 27 Januari 2015 / Disetujui 22 Maret 2016

ABSTRACT

TNKpS gap management for achieving management goals can be emerge when the goals are not able to compensated with the resources owned. So alternative management that can be done was collaborated with other stakeholders. One of the basic collaboration is to know the goals detail and resources that belonging to the stakeholders. The purpose of this research is to analyze the goals and resources belonging to the stakeholders. Research carried out in all SPTN TNKpS, at November and December 2014 and January and February 2015. The data that collected consist of supporting data in the form of management document, report activities, and literature. While the main data consist of RPTN TNKpS documents, the perception score of management goals (economic, social, and ecology) and stakeholders resources (human, financial, physical, DIT) with functionality, importance, availability, and tangibility attributes. The stakeholders with ecological goals like BTNKpS, NGOs, and local government while the community, universities, and the private sector more in neutral role. The social goals done by local government with assessment score of 6,15 (appropriate category), also by BTNKpS and NGOs. While the economic goals done by private sector (5,97, appropriate category), and community (5,69 (appropriate category). The resources aspect, the quality of human resources TNKpS, local government, private sector, and NGOs is good enough, but less in the term of number. The financial aspect quite a lot in the private sector and NGO as well as more adaptive. The physical aspects of private sector and local government quite a lot, while the community and the other institutions have less. SDIT aspects that owned by community are very much, but not in systematic and structured form. As a whole the purpose and resources which is owned by the stakeholders had been suitable and sufficient to cover up the gap management.

Keyword: kolaboratif management, gap, goals and resources, stakeholders, TNKpS

ABSTRAK

Gap pengelolaan Taman Nasional laut Kepulauan Seribu (TNKpS) untuk mencapai tujuan pengelolaan muncul ketika tujuan yang ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumberdaya yang dimiliki. Sehingga alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan stakeholders lain. Dasar kolaborasi salah satunya adalah dengan mengetahui detil tujuan dan sumberdaya yang dimiliki stakeholders. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tujuan dan sumberdaya yang dimiliki stakeholders. Penelitian dilaksanakan pada seluruh Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) TNKpS, pada bulan November dan Desember 2014 serta Januari dan Februari 2015. Data yang dikumpulkan meliputi data pendukung berupa dokumen pengelolaan, laporan kegiatan, dan literatur. Sedangkan data utama berupa dokumen RPTN TNKpS juga nilai persepsi terhadap tujuan pengelolaan (ekologi, ekonomi, sosial) dan sumberdaya (manusia, finansial, fisik, DIT) dengan atribut *functionality, importance, availability, dan tangibility*. Pihak dengan tujuan ekologi meliputi BTNKpS, LSM, dan Pemda sedangkan pihak masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta lebih berperan netral. Tujuan pengelolaan sosial dilakukan oleh Pemda dengan skor penilaian 6,15 (kategori sesuai), juga oleh BTNKpS dan LSM. Sementara tujuan ekonomi dilakukan oleh pihak swasta (5,97 kategori sesuai) dan masyarakat (5,69 kategori sesuai). Pada aspek sumberdaya, kualitas SDM pihak TNKpS, Pemda, swasta, dan LSM tergolong baik, namun kurang dalam segi jumlah. Aspek pendanaan cukup banyak pada pihak swasta dan LSM serta lebih adaptif. Aspek fisik pihak swasta dan Pemda cukup banyak, sedangkan masyarakat dan lembaga lain kurang memiliki sumberdaya fisik. Aspek SDIT yang dimiliki masyarakat sangat banyak, belum sistematis dan terstruktur. Secara keseluruhan tujuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak sesuai dan mencukupi untuk saling menutupi gap pengelolaan.

Kata kunci: gap, para pihak, pengelolaan kolaboratif, TNKpS, tujuan dan sumberdaya

PENDAHULUAN

Taman nasional didefinisikan sebagai kawasan yang memiliki sumber daya alam hayati, ekosistem dan gejala alam yang khas, unik, utuh dan alami serta memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis dan alami (PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam). Penyelenggaraan taman nasional salah satunya pada

Taman Nasional laut Kepulauan Seribu (TNKpS) merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan melestarikan keanekaragaman hayati serta sistem penyangga kehidupan dengan sistem zonasi, yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, zona perlindungan, dan zona pemukiman.

Kompleksitas pengelolaan TNKpS terlihat dari seluruh wilayahnya yang merupakan kawasan perairan laut, dengan terdapat 110 daratan yang terdiri dari pulau,

karang, dan gosong namun hanya dua pulau yang dikelola oleh TNKpS (Pulau Penjaliran Barat dan Timur) sedangkan 108 pulau dikelola oleh swasta, perorangan dan masyarakat. Didalam kawasan TNKpS juga terdapat lima daratan yang merupakan pulau pemukiman dengan jumlah penduduk mencapai 14.061 jiwa. Kompleksitas pengelolaan TNKpS selain kondisi kawasan juga terdapat pada banyaknya kepentingan para *stakeholders* dalam mengelola kawasan seperti pemanfaatan wisata, pemanfaatan sumberdaya ikan dan biota laut dan lainnya. Pengelolaan oleh *stakeholders* yang mencakup bidang ekologi, ekonomi dan sosial harus diseimbangkan untuk mencapai pengelolaan berkelanjutan (*sustainable development*).

Kompleksitas pengelolaan TNKpS selain kondisi kawasan juga terdapat pada aktualisasi penerapan konservasi yaitu bidang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan. Kompleksitas pengelolaan TNKpS tidak dapat diselesaikan oleh pihak TNKpS sendiri melainkan harus berkolaborasi dengan pihak lain agar tujuan pengelolaan konservasi terwujud. Pengelolaan kolaborasi dapat terjadi ketika muncul gap dalam pengelolaan kawasan. *Gap* pengelolaan tercipta ketika tujuan yang ingin dicapai tidak mampu diimbangi dengan sumberdaya yang dimiliki, sehingga alternatif pengelolaan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dengan pihak lain.

Kolaborasi dapat terbentuk dan efektif jika tujuan pengelolaan para pihak dapat mendukung kolaborasi, serta sumberdaya yang dimiliki dapat menutupi kekurangan sumberdaya pihak lain. Bukan sekedar pertukaran sumberdaya maupun lebih pada berbagi sumberdaya. Huxham dan Vangen (2000) menyatakan bahwa sumberdaya yang dimiliki oleh *stakeholders* merupakan salah satu kunci sukses kolaborasi disamping komposisi anggota yang berkolaborasi, struktur jaringan kolaborasi dan kepercayaan antar *stakeholders* yang berkolaborasi. Sehingga penting untuk melakukan analisis tujuan dan sumberdaya para pihak sebagai cikal bakal terbentuknya pengelolaan kolaboratif di TNKpS. Kejelasan tujuan dan sumberdaya para pihak dalam pengelolaan konservasi dapat menjadi bahan masukan untuk membentuk pengelolaan kolaboratif di TNKpS.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tujuan pengelolaan dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak, sehingga dapat menjadi dasar pengelolaan kolaboratif untuk mencapai pengelolaan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada bulan November dan Desember 2014 serta pada bulan Januari dan Februari 2015. Lokasi penelitian yaitu di Balai TNKpS, seluruh SPTN TNKpS yaitu SPTN I Pulau Kelapa, II Pulau Harapan, dan III Pulau Pramuka serta di pulau-pulau dan lokasi tempat *stakeholders* berada yaitu Pulau Panggang,

Pulau Sepa Besar, Macan Kecil, Kelapa Dua, dan Pulau Kotok Besar. Pemilihan waktu pada bulan Oktober sampai Desember tersebut dipilih tidak mengacu pada tujuan atau objektivitas tertentu.

Alat yang digunakan dalam penelitian meliputi kamera untuk dokumentasi kegiatan, alat perekam perangkat bantu wawancara yang merekam percakapan, kuisisioner dan panduan wawancara untuk memperoleh data. Subyek yang digunakan merupakan para pihak yang mampu merespon dan berpikir terhadap hal-hal yang ditanyakan. Subyek atau responden yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh *stakeholders* yang berada dalam areal TNKpS (Pihak TNKPS, pemda, masyarakat, swasta, LSM) yang berkaitan dengan pengelolaan TNKpS.

Jenis data yang digunakan meliputi data sekunder, berupa penelusuran mendalam dokumen berupa buku, laporan hasil kegiatan dan laporan lainnya, digunakan untuk menunjang data primer yang akan dikumpulkan, maupun sebagai studi literatur pada awal penyusunan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen RPTN TNKpS 1999-2019, keadaan umum lokasi (letak, luas, kondisi fisik, dan sosial ekonomi) dan data kependudukan (jumlah, tingkat pendidikan, mata pencaharian, dan potensi lahan). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka, yaitu dengan penelusuran pustaka, dokumen, dan laporan untuk memperoleh data pendukung, data tambahan, maupun penjelasan ilmiah yang terkait dengan topik penelitian.

Data primer meliputi data tujuan dan sumberdaya para pihak serta nilai persepsi para pihak. Data primer diperoleh dari observasi langsung di TNKpS serta dengan wawancara dan penyebaran kuisisioner tertutup (*closed-ended*) kepada para *stakeholders* yang terlibat dalam pengelolaan TNKpS baik pengelola, LSM, dan masyarakat. Kuisisioner tertutup diformulasikan menjadi tujuh skala berdasarkan Skala Likert yang disesuaikan yaitu 1-7 (1=sangat tidak sesuai; 2=tidak sesuai; 3=agak tidak sesuai; 4=biasa saja; 5=agak sesuai; 6=sesuai; 7=sangat sesuai (Avenzora 2008). Aspek kuisisioner yang dianalisis meliputi tujuan para pihak pada tujuan ekologi, ekonomi, dan sosial. Sedangkan aspek sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (SDM), sumberdaya finansial/ pendanaan (SDP). Sumberdaya fisik (SDF), dan sumberdaya data, informasi dan teknologi (SDIT). Masing-masing aspek sumberdaya tersebut dianalisis dengan penjabaran pada atribut-atribut, meliputi *functionality*, *importance*, *availability*, dan *tangibility* (Tschirhart et al. 2009 dalam O'Leary dan Bingham 2009).

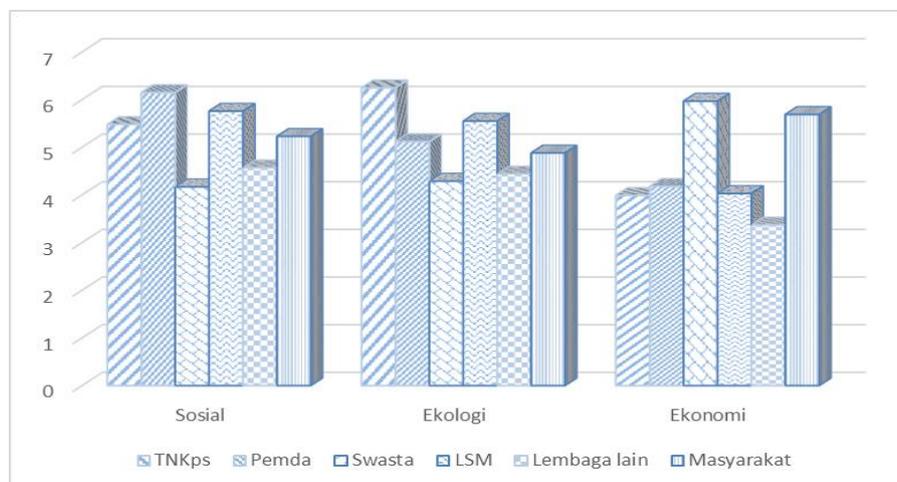
Data yang berasal dari pengolahan kuisisioner dengan skala likert yang didasarkan pada sumberdaya para *stakeholders* pada aspek konservasi, dianalisis secara deskriptif. Analisis deskriptif adalah penjabaran atau pendeskripsian hasil olahan data statistik kuisisioner dengan skala likert secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Tujuan Pengelolaan Para Pihak

Untuk mencapai efektivitas pengelolaan taman nasional, dapat dilakukan pengelolaan secara kolaboratif. Sejalan dengan pernyataan Kobbail (2010) yang

menyatakan bahwa *collaborative management* dari suatu sumberdaya alam dapat dijadikan strategi yang efektif untuk keberlanjutan pengelolaan kehutanan serta pembangunan daerah tertinggal. Berikut disajikan Gambar 1 mengenai tujuan pengelolaan masing-masing lembaga.



Gambar 1 Tujuan pengelolaan para pihak

a. Tujuan Ekologi

Pihak dengan tujuan ekologi seperti BTNKpS, LSM, dan Pemda sedangkan pihak masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta lebih pada peran netral dalam tujuan ekologi BTNKpS sebagai pemangku utama TNKpS memiliki tujuan utama pengelolaan adalah ekologi, hal tersebut terlihat dari skor penilaian yang mencapai 6,25 (sesuai). Tujuan pengelolaan tersebut sesuai dengan mandat utama BTNKpS sebagai UPT pengelolaan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dengan prinsip konservasi. Pihak LSM yang ada di TNKpS juga memiliki fokus besar pada ekologi, yang dibuktikan dengan skor 5,55 (sesuai). Tujuan pengelolaan ekologi dari LSM memiliki bidang pengelolaan ekosistem terumbu karang dan biota laut, rehabilitasi SDA, rehabilitasi dan translokasi jenis elang, serta pelestarian penyu. Pemda memiliki skor tujuan pengelolaan ekologi sebesar 5,12 (agak sesuai) yang berarti bahwa pemda juga memiliki kontribusi yang besar dalam pengelolaan ekologi. Pengelolaan ekologi yang dilakukan Pemda difokuskan pada jenis-jenis SDA dan ekosistem di TNKpS, seperti dibentuknya APL (Area Perlindungan Laut).

Pihak masyarakat melakukan pengelolaan ekologi terutama dilakukan oleh lembaga masyarakat bidang lingkungan seperti Pernitas, paguyuban pemandu, dan SPKP. Skor pengelolaan ekologi dari pihak masyarakat sebesar 4,88 (agak sesuai), namun pengelolaan ekologi dari masyarakat secara keseluruhan belum terlaksana. Alasannya adalah masyarakat masih memiliki motivasi ekonomi jika melakukan sesuatu, dan belum memiliki

kesadaran untuk melakukan kegiatan konservasi meskipun dengan hal yang kecil.

Lembaga yang berkontribusi pada penelitian pada keseluruhan bidang yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial. Sehingga tujuan pengelolaannya lebih pada pendukung dan pemberi masukan mengenai pengelolaan ekologi, ekonomi dan sosial. Sedangkan lembaga swasta memiliki tujuan dan fokus pengelolaan tersendiri yaitu tujuan ekonomi. Sehingga dalam pengelolaan ekologi, pihak swasta kurang melakukan, meskipun terdapat Astra Daihatsu Motor dan PT. Pulau Sepa Permai yang sama-sama mendukung pelestarian penyu sisik. Namun pelestarian penyu oleh Daihatsu hanya mendukung pada pembenahan dan pengadaan sarana prasarana pelestarian dan PT. Pulau Sepa permai dalam melestarikan penyu belum maksimal.

b. Tujuan Sosial

Tujuan pengelolaan sosial di TNKpS lebih dilakukan oleh pihak Pemda yang terlihat dari skor penilaian sebesar 6,15 (kategori sesuai). Hal tersebut terbukti dari kegiatan pengelolaan Pemda yang menitikberatkan pada pengelolaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan pemda seperti pemberdayaan masyarakat, pengadaan fasilitas umum, hingga pengelolaan administrasi masyarakat. Pihak lain yang memiliki tujuan pokok dalam kegiatan sosial adalah pihak LSM dengan skor penilaian sebesar 5,76 (kategori sesuai). LSM dengan tujuan utama pembinaan dan pengembangan masyarakat sekitar adalah RARE dengan program kampanye “*fish forever*”. Program tersebut diharapkan

mampu menjadi jembatan awal dalam upaya penyeimbangan antara perlindungan kawasan dengan pemanfaatan yang bertanggung jawab, serta dalam upaya menumbuhkan kesadaran konservasi oleh masyarakat sekitar.

Pihak TNKpS sebagai pengelola utama TNKpS juga memiliki tujuan pengelolaan bidang sosial. Hal tersebut terlihat dari skor tujuan pengelolaan sosial oleh TNKpS sebesar 5,48 (kategori agak sesuai). Bentuk nyata dalam upaya pembinaan dan pengembangan daerah penyangga dibentuknya SPKP pada ketiga SPTN TNKpS. Lembaga lain seperti dari pihak perguruan tinggi berperan cukup yaitu dengan skor 4,57 (agak sesuai). Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut tidak terfokus pada tujuan sosial meskipun juga memiliki tujuan sosial. Pihak masyarakat berdasarkan hasil wawancara menganggap berperan aktif juga dalam pengembangan dan pembinaan sesama kelompok masyarakat. Hal tersebut terbukti juga dari hasil skor penilaian tujuan yang memiliki nilai sebesar 5,23 (kategori agak sesuai). Banyak dari kegiatan khususnya kegiatan untuk masyarakat itu sendiri yang dimotori oleh masyarakat setempat itu sendiri. Namun disadari bahwa kebanyakan kegiatan pemberdayaan masyarakat masih dilakukan oleh pihak lain.

c. Tujuan Ekonomi

Tujuan pengelolaan terakhir yaitu tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi lebih didominasi oleh lembaga swasta yaitu dengan skor penilaian sebesar 5,97 (kategori sesuai). Hal tersebut sesuai dengan hasil observasi bahwa pihak swasta memiliki orientasi ekonomi dalam pengelolaannya yaitu PT. Pulau Sepa Permai dan penyelenggara wisata resort lainnya pada pengelolaan obyek dan daya tarik wisata. Pengelolaan wisata resort dilakukan pada pulau yang berbeda-beda seperti Pulau Sepa, Pulau Puteri, Pulau Macan Kecil, Pulau Pantara, dan lain sebagainya. Pihak lain yang memiliki tujuan ekonomi adalah masyarakat sekitar. Motif ekonomi tersebut sejalan dengan skor penilaian sebesar 5,69

(kategori sesuai). Masyarakat sejatinya memiliki motif ekonomi dalam kegiatan yang dilakukan, baik berupa nelayan maupun penyelenggara wisata berorientasi untuk mendapatkan keuntungan.

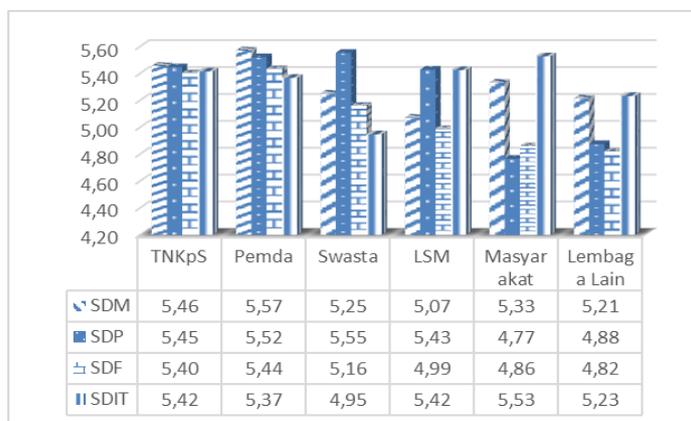
Pihak LSM menyatakan biasa saja atau berpendapat netral pada motif ekonomi yaitu dengan skor penilaian sebesar 4,03 (biasa saja). Hal tersebut menunjukkan bahwa pihak LSM juga memiliki motif ekonomi namun tidak menjadi tujuan utama. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Fleishman (2009) dalam O’Leary dan Bingham (2009) yang menyatakan bahwa motif ekonomi bukan sebagai motivasi kritis NPO (*Non-profit Organizations*) dalam pengelolaan.

Pihak BTNKpS dan Pemda juga berpendapat biasa saja mengenai tujuan ekonomi. Hal tersebut terlihat dari skor penilaian sebesar 3,99 dan 4,18 (kategori biasa saja). Sama halnya dengan pihak LSM, pihak BTNKpS dan Pemda juga memiliki motif ekonomi, namun tujuan ekonomi tersebut bertujuan untuk pemasukan kas negara atau meningkatkan catatan pendapatan asli daerah.

Skor penilaian terendah ada pada pihak perguruan tinggi, yang berpendapat bahwa tidak memiliki tujuan ekonomi dalam kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut terlihat dari skor penilaian sebesar 3,37 (kategori agak tidak sesuai), yang menunjukkan bahwa pihak tersebut kurang atau bahkan tidak memiliki motif ekonomi dalam aktifitas dan kegiatan yang dilakukan.

2. Analisis Sumberdaya Para Pihak

Sumberdaya merupakan aset yang sangat penting perannya dalam pengelolaan. Sumberdaya juga merupakan aspek yang sangat penting dalam kolaborasi pengelolaan karna sumberdaya dapat menentukan dasar kolaborasi serta menjadi dasar para pihak untuk tertarik melakukan kolaborasi. Jenis sumberdaya dalam kolaborasi dapat mencakup kategori SDM (Sumberdaya Manusia), SDP (Sumberdaya finansial/pendanaan), SDF (Sumberdaya fisik), dan SDI (Sumberdaya data, informasi, dan teknologi). Berikut disajikan Gambar 2 mengenai sumberdaya yang dimiliki para pihak.



Gambar 2 Sumberdaya para pihak

Secara garis besar dari aspek sumberdaya manusia (SDM), pihak TNKpS memiliki SDM dengan keahlian yang cukup mumpuni dan alokasi yang tepat, namun kurang dalam hal kuantitas. Pihak Pemda memiliki SDM dengan keahlian menyeluruh dan jumlah yang cukup, namun alokasi yang belum maksimal khususnya pada bidang konservasi. Pihak swasta dan LSM memiliki SDM dengan jumlah yang tidak banyak, namun memiliki fokus keahlian yang sangat baik. Masyarakat memiliki SDM dengan jumlah yang banyak, namun dengan kapasitas biasa saja serta tidak terorganisir dengan baik (individual).

Pada aspek sumberdaya finansial/pendanaan (SDP), pihak TNKpS dan Pemda memiliki SDP namun terbatas dari segi jumlahnya. Sedangkan pihak swasta dan LSM memiliki SDP yang dapat digunakan dan lebih adaptif dengan kondisi di lapangan. Sehingga SDP yang dimiliki dapat menutupi seluruh kegiatan yang dilakukan. Sedangkan pihak masyarakat dan lembaga lain, memiliki SDP yang tidak banyak hanya cukup untuk satu atau dua kegiatan. Pihak masyarakat memiliki SDP yang terbatas dan sering melakukan kegiatan dengan sumber pendanaan berdasarkan sukarela.

Aspek sumberdaya fisik (SDF) TNKpS dan LSM memiliki SDF yang tidak banyak, namun sesuai dengan program. Pihak swasta dan Pemda memiliki SDF yang cukup banyak dan *tangible*. Sedangkan pihak masyarakat dan lembaga lain kurang memiliki SDF, karena SDF yang ada hanya cukup memenuhi pengelolaan saat ini. Atribut yang hampir keseluruhan tidak memiliki adalah SDF pengganti. Karena SDF yang ada juga digunakan untuk fungsi lain (multi fungsi) sehingga tidak diadakan SDF pengganti.

Secara keseluruhan aspek sumberdaya data, informasi, dan teknologi (SDIT) dimiliki oleh seluruh pihak namun dengan intensitas, sifat, cakupan, jumlah, dan kualitas yang berbeda-beda. Pihak TNKpS dan Pemda memiliki SDIT yang serupa karena mengelola wilayah dengan tujuan yang hampir sama (ekologi, masyarakat, ekonomi). Pihak swasta memiliki SDIT yang unggul pada bidang yang dikelola (ekonomi), sedangkan pihak masyarakat memiliki SDIT yang banyak, namun dengan kualitas yang kurang (dalam hal kesatuan dan sistematika). Untuk pihak perguruan tinggi memiliki SDIT yang seimbang pada komponen-komponen penyusunnya sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lokasi kajian yang akan dikaji.

Berdasarkan Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa pada masing-masing sumberdaya terdapat pihak yang lebih dominan dari pihak lainnya. Secara umum sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak tergolong kategori agak sesuai dengan skor 5 dan sesuai dengan skor 6. Hal tersebut menunjukkan bahwa para pihak memiliki sumberdaya yang cukup untuk melakukan kolaborasi khususnya dalam pengelolaan TNKpS.

Sumberdaya yang menjadi dasar pembentukan kolaborasi, selanjutnya akan menjadi faktor pengikat bagi para pihak yang terlibat. Karena dalam kolaborasi

sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak bukan sekedar ditukarkan untuk mendukung kolaborasi, namun lebih pada berbagi (*take and give*). Pengelolaan dengan bentuk kolaborasi menghendaki lebih dari sekedar “pertukaran sumberdaya” atau “*resource exchanges*”, namun lebih menekankan pada “berbagi sumberdaya” atau “*resource sharing*”. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan O’Leary dan Bingham (2009) yang menyatakan bahwa kolaborasi dalam suatu pengelolaan bukan sekedar pertukaran sumberdaya untuk mencapai tujuan kolaborasi namun lebih pada berbagi sumberdaya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan kolaborasi.

SIMPULAN

Pihak dengan tujuan ekologi seperti BTNKpS, LSM, dan Pemda sedangkan pihak masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta lebih pada peran netral dalam tujuan lingkungan. Tujuan pengelolaan sosial di TNKpS lebih dilakukan oleh pihak Pemda yang terlihat dari skor penilaian sebesar 6,15 (kategori sesuai), juga oleh BTNKpS dan LSM. Sementara tujuan ekonomi swasta yaitu dengan skor penilaian sebesar 5,97 (kategori sesuai), juga masyarakat sekitar dengan skor penilaian sebesar 5,69 (kategori sesuai).

Sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak, pada aspek SDM TNKpS, Pemda, swasta, dan LSM memiliki SDM dengan kualitas yang baik pada bidang masing-masing, namun kurang dalam segi jumlah. Sedangkan pihak masyarakat memiliki SDM dengan jumlah yang banyak namun dengan kompetensi yang belum mumpuni. Aspek SDP yang dimiliki pihak TNKpS dan Pemda terbatas jumlahnya dan sesuai penganggaran diawal, swasta dan LSM cukup banyak dan lebih adaptif, sedangkan lembaga lain dan masyarakat memiliki SDP sedikit dan cenderung kurang. Aspek SDF yang dimiliki TNKpS dan LSM memiliki SDF yang tidak banyak, pihak swasta dan Pemda memiliki SDF cukup banyak, sedangkan pihak lembaga lain dan masyarakat kurang memiliki SDF. Aspek SDIT yang dimiliki pihak TNKpS dan LSM cukup banyak khususnya bidang pelestarian dan perlindungan alam, Sedangkan Pemda cukup banyak pada bidang pengembangan masyarakat dan daerah. Pihak swasta banyak pada bidang ekonomi, sedangkan masyarakat memiliki banyak informasi namun belum sistematis. Secara keseluruhan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak mencukupi untuk saling menutup gap pengelolaan yang terjadi melalui pengelolaan kolaboratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Avenzora Ricky. 2008. *Ekoturisme-Teori dan Praktek. BRR-NAD Nias*. Banda Aceh (ID): Ministry of Tourism and Creative Economy.

- [Dephut] Departemen Kehutanan. 2011. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
- Huxham Chris and Siv Vangen. 2000. Ambiguity, Complexity and Dynamics in the Membership of Collaboration. *Human Relations*. 53(6): 771-806.
- Kobbail A A Rahim. 2010. Collaborative Management for Sustainable Development of Natural Forests in Sudan: Case Study of Elrawashda and Elain Natural Forests Reserves. *International Journal of Social Forestry (IJSF)*. 3(2): 101-133.
- O'Leary Rosemary and Bingham Lisa B. 2009. *The Collaborative Public Manager*. Washington DC (US): Georgetown University Press.